

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat

The Influence Of Original Local Government Revenue, Fiscal Balance Transfer And Capital Expenditure On The Financial Performance Of Local Government Of Regencies And Cities In West Java Province

Ihsan Wahyudin

Program Studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: ihsan.wahyudin.amp16@polban.ac.id

Hastuti

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: hastuti@polban.ac.id

Abstract: *The financial performance of local governments is a picture of the success of local governments in managing their regional finances. The purpose of this study was to determine the effect of partially and simultaneous regional original income, balance funds and capital expenditure on the financial performance of district and city local governments in West Java province. This research is a research that uses descriptive quantitative approach. The subjects in this study were 27 districts and cities in the province of West Java. The data used in this study are secondary data in the form of local government financial reports in West Java province in the 2014-2018 fiscal year obtained from the Badan Pusat Statistik and the Badan Pemeriksa Keuangan. Data analysis techniques in this study used simple linear regression analysis and multiple linear regression analysis. The results of the study showed that Original Local Government revenues had a positive and significant effect on the financial performance of local governments. Fiscal Balance Transfer have a positive and significant effect on the financial performance of local governments, Capital Expenditure hasn't a significant positive effect on the financial performance of local governments. Simultaneously Original Local Government Revenue, Fiscal Balance Transfer and Capital Expenditure have a significant positive effect on the financial performance of local governments.*

Keywords: *Original Local Government Revenue, Fiscal Balance Transfer, Capital Expenditure, Financial Performance of local government.*

1. Pendahuluan

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi landasan utama dalam pelaksanaan Otonomi daerah. Alasan diterapkannya kebijakan otonomi adalah karena pemerintah pusat tidak mampu sendiri mengawasi pembangunan daerah secara keseluruhan (Rosemarry, Justine, & Barry, 2016). Hal ini sejalan dengan pendapat Halaskova et al (2016) yang menyatakan bahwa potensi-potensi yang dimiliki daerah memiliki hubungan dengan kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat. Penerapan Otonomi daerah menjadi perwujudan pergeseran sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi.

Penerapan desentralisasi menekankan adanya pelimpahan wewenang pengelolaan sumber daya keuangan daerah, dengan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat. Namun Kenyataan yang terjadi adalah masih tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mencatat kontribusi PAD seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat berkisar antara 14,07 sampai 22,44 persen pada tahun 2014-2018, sementara kontribusi dana perimbangan berkisar antara 35,34 sampai 44,72 persen, sisanya persentase pendapatan yang bersumber dari pendapatan lain yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa peranan PAD hampir di seluruh Kabupaten/Kota Jawa Barat yang relatif kecil mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pemerintah pusat.

Hal tersebut diperkuat dengan data BPS yang menunjukkan pengelompokan kabupaten/kota di Jawa Barat menurut persentase PAD terhadap total Belanja daerah.

Tabel 1-1 Jumlah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat menurut Kelompok persentase PAD terhadap total Belanja 2014-2018

Kelompok persentase PAD terhadap Total Belanja (%)	Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat				
	2014	2015	2016	2017	2018
<10	6	4	4	4	4
10-19,99	10	10	12	12	12
20-30	10	4	8	8	8
>30	0	9	3	3	3
Jumlah	26	27	27	27	27

Sumber : Badan Pusat Statistik (2018)

Dari tabel diatas selama tahun 2014-2018 dapat diketahui bahwa. Persentase rata-rata penggunaan PAD untuk belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat berada pada 10 sampai 19,99 persen. Bahkan masih terdapat Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat yang persentase penggunaan PAD untuk belanja daerah berada dibawah 10 persen. Artinya belanja daerah di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dibiayai paling dominan dari Dana Perimbangan atau pendapatan transfer.

Permasalahan diatas dapat mengindikasikan terjadinya fenomena Fly Paper Effect yaitu suatu fenomena dimana kondisi pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak dari transfer daripada pendapatan asli daerahnya sehingga dapat menyebabkan pemborosan dalam belanja daerah (Maimunah, 2006). Seharusnya dengan meningkatnya Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan utama dari diterimanya dana tersebut, dan juga diimbangi dengan meningkatnya infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana publik yaitu dengan mengalokasikan penerimaan tersebut untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian Budianto (2016) dan Andirfa dkk (2016) menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah artinya semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2016) yang menyatakan bahwa semakin besar pendapatan transfer yang diterima daerah akan menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin menurun

Selanjutnya terjadi ketimpangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1-2 Ketimpangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat (Juta Rupiah)

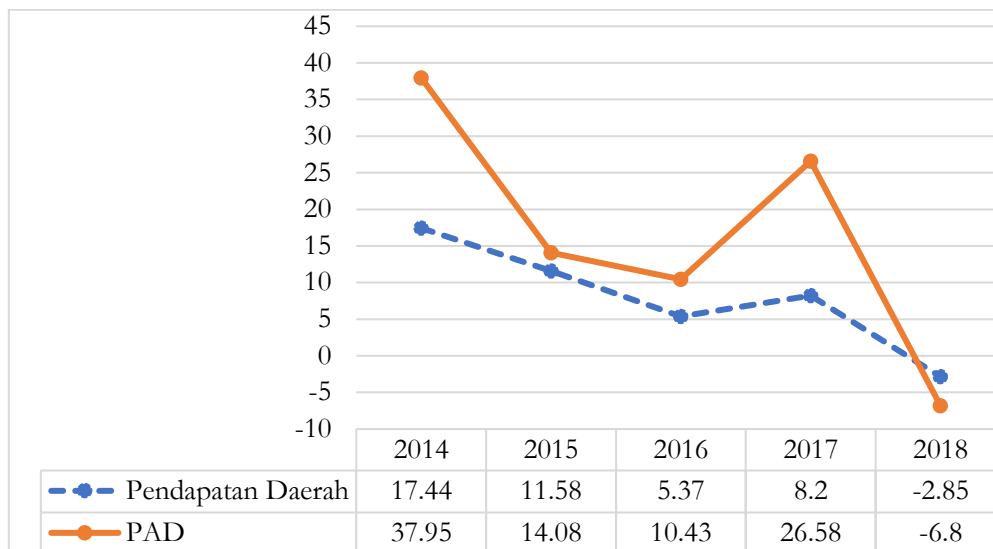
Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah				
	2014	2015	2016	2017	2018
	Tertinggi				
Kota Bandung	1.716.057	1.859.694	2.152.755	2.578.457	3.397.309
Kabupaten Bogor	1.712.937	1.904.144	2.299.862	3.041.872	2.348.303
Kota Bekasi	1.205.265	1.497.596	1.686.600	1.757.641	2.431.127
	Terendah				
Kabupaten Pangandaran	32.476	180.252	66.385	118.011	142.125
Kota Banjar	118.592	119.829	116.321	125.454	131.300
Kabupaten Ciamis	182.320	180.304	204.759	222.938	215.240

Sumber : Data Diolah (2020)

Berdasarkan tabel diatas terlihat perbedaan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang signifikan. Atas dasar tersebut untuk dapat mengeneralisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat diperlukan penelitian terhadap seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.

Permasalahan lain yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah persentase dana yang digunakan untuk Belanja Modal belum mencapai 30 Persen sesuai ketentuan Pedoman Penyusunan APBD yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Fenomena yang termuat dalam Bisnis.com (2019), menyatakan bahwa selama tahun 2018 belanja pegawai masih menjadi jenis belanja yang paling dominan dalam menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat dari total belanja pemerintah daerah 35,6 persen dari anggaran tersebut direalisasikan untuk belanja pegawai. Sementara Belanja modal hanya mengambil porsi 19,4 persen. Menurut Nur (2011), tingginya proporsi anggaran untuk belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai daripada belanja langsung dapat mengakibatkan rendahnya nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di mata masyarakat.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kinerja Keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat jika dilihat dari perbandingan pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan Pendapatan daerah terlihat seperti pada gambar berikut :



Gambar 1-1 Perbandingan pertumbuhan PAD dengan Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, 2014-2018 (Persen)

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2014-2018 sebesar 16,44 persen lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebesar yakni 7,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2014-2018 jika dilihat dari pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan Pendapatan Daerah tumbuh positif.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah penting untuk dilakukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan secara umum hasilnya menyatakan bahwa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan dinyatakan dalam rasio keuangan dapat menunjukan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai upaya pengukuran kinerja keuangan lebih dominan terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Informasi yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat dijadikan instrumen untuk mengukur kinerja keuangan daerah dengan melakukan Analisis rasio keuangan. Hasil dari perhitungan analisis rasio selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman pengukuran untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah suatu daerah dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan yang dilakukan Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah yaitu: 1) bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa barat? 2) bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa barat? 3) bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa barat? 4) bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa barat?. Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini 1) Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa barat 2) Untuk

mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa barat 3) Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa barat 4) Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa barat.

2. Kajian Pustaka

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2004). Halim mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh atas pemanfaatan potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan 3) Lain PAD yang sah.

2.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi (Republik Indonesia, 2004). Sedangkan Djaenuri berpendapat bahwa Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Djaenuri, 2012). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas: 1) Dana Bagi Hasil (DBH) 2) Dana Alokasi Umum (DAU) 3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Kementerian Keuangan, 2007). Berdasarkan pengertian Belanja Modal diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang digunakan untuk pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, mengkategorikan Belanja Modal kedalam 5 (lima) kategori utama, yakni: 1) Belanja Modal Tanah 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 4) Belanja Modal Fisik Lainnya.

2.4. Kinerja Keuangan Daerah

Mahsun mendefinisikan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah (Mahsun, 2012).

Hal ini sejalan dengan pendapat Halim yang menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Halim, 2007). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap informasi yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rasio kinerja keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan daerah antara lain : 1) Rasio Kemandirian 2) Rasio Ketergantungan 3) Rasio Desentralisasi Fiskal[19].

2.5. Hipotesis Penelitian

1. H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
2. H₂: Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3. H₃: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
4. H₄: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan Analisis Data Sekunder (ADS). Heaton dalam Andrews et al menerangkan bahwa Analisis Data Sekunder merupakan suatu strategi penelitian yang memanfaatkan data kuantitatif ataupun kualitatif yang sudah ada untuk menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian terdahulu[16]. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 27 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota.

3.1. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data yang dalam penelitian ini merupakan data Dokumenter berupa data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018. Data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan dibandingkan dengan data yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

3.2. Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan sebagai prasyarat analisis dalam penelitian ini antara lain: 1) Uji Multikolinearitas 2) Uji Autokorelasi 3) Uji Heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018. Analisis Regresi Linear Sederhana digunakan untuk menguji pengaruh parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal. Sedangkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal diuji menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018

Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian analisis regresi linier sederhana prediktor Pendapatan Asli Daerah dengan persamaan regresi $Y = -103,315 + 3,842X_1 + \varepsilon$. Nilai koefisien korelasi sebesar (r_{x_1y}) sebesar 0,983 dan koefisien determinasi ($r^2_{x_1y}$) sebesar 0,966. Hal ini menunjukkan bahwa 96,6% Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), sementara 3,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$), dan nilai t hitung sebesar 61,563 lebih besar dari t tabel sebesar 1,97824 ($61,563 > 1,97824$). sehingga pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Andirfa dkk (2016) yang berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, akan tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Rochmah (2015), Budianto (2016) dan Antari (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pengaruh perubahan Pendapatan Asli Daerah berbanding lurus perubahan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sehingga semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dikatakan meningkat. Jika suatu daerah mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hal tersebut akan menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan optimalisasi potensi pendapatannya sudah baik sehingga akan memaksimalkan penerimaan pemerintahan daerah yang nantinya akan berdampak pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang semakin baik. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penguatan data yang menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Langkah konkret yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan mengembangkan potensi Pariwisata daerah. Sektor pariwisata mempunyai peran yang cukup besar dalam menggerakkan roda perekonomian suatu daerah. Dengan adanya pengembangan di sektor pariwisata, maka akan menimbulkan lapangan pekerjaan yang baru serta muncul usaha-usaha baru seperti hotel atau penginapan serta restoran sehingga terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah dari pajak hotel, pajak parkir serta pajak restoran yang nantinya akan berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Selain itu langkah konkret lain yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan dan pendanaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mengingat peran sektor ini terhadap perekonomian negara sangat berpengaruh, maka dari itu pembinaan dan pendanaan terhadap sektor UMKM sangat penting dilakukan sehingga perekonomian di suatu daerah dapat berkembang. Agar langkah tersebut berhasil dilakukan, Pemerintah Daerah harus merubah birokrasi perizinan serta membangun infrastruktur demi kelancaran roda perekonomian daerah. Apabila pengelolaan sumber pendapatan daerah sudah dilakukan dengan baik, Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi sumber pendanaan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya serta tidak lagi bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut meningkatkan

kemandirian keuangan suatu daerah. Kemandirian Keuangan suatu daerah serta Kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola potensi sumber pendapatan asli daerahnya menentukan seberapa besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

4.2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018

Analisis regresi linier sederhana dengan prediktor dana perimbangan menunjukkan hasil penelitian yang menjawab hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian analisis regresi linier sederhana prediktor Dana Perimbangan dengan persamaan regresi $Y = 184,505 + 3,711X_2 + \varepsilon$. Nilai koefisien korelasi sebesar (r_{x_2y}) sebesar 0,834 dan koefisien determinasi ($r^2_{x_2y}$) sebesar 0,696. Hal ini menunjukkan bahwa 69,6% Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Dana Perimbangan (X_2), sementara 30,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Nilai signifikansi variabel Dana Perimbangan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,00 ($0,00 > 0,05$), dan nilai t hitung sebesar -17,462 lebih besar dari t tabel sebesar 1,97824 ($17,462 > 1,97824$). sehingga pengaruh variabel Dana Perimbangan (X_2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah positif dan signifikan. Nilai t hitung dari Dana Perimbangan bernilai negatif ini dapat diartikan bahwa semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat akan memperlihatkan semakin kuat Pemerintah Daerah bergantung kepada bantuan Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini tidak selaras dengan penelitian-penelitian terdahulunya yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah. hasil penelitian ini menyatakan bahwa Dana Perimbangan memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kemampuan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dalam menghimpun pendapatan sangat bervariasi hal ini bergantung pada kondisi daerah yang bersangkutan. Tingkat kemampuan daerah dapat dilihat dari kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah, serta tingkat ketercapaian standar pelayanan minimum di setiap daerah. Dalam hal pemenuhan standar pelayanan minimum, daerah yang mempunyai sumber daya yang sedikit membutuhkan subsidi atau Dana Perimbangan. Dengan adanya Dana Perimbangan diharapkan Pemerintah Daerah dapat menggunakan sumber pendanaan tersebut untuk kegiatan dan proyek pemerintah yang konstruktif dan produktif sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan income yang lebih besar sehingga Pendapatan Asli Daerah akan meningkat dan nantinya daerah tersebut dapat mendanai kegiatan pemerintahannya sendiri. Maka dari itu dengan adanya Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun disisi lain, hal ini dapat menyebabkan suatu daerah memiliki tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang tinggi, sehingga tingkat kemandirian suatu daerah tersebut menurun. Hasil wawancara penguatan data sejalan dengan pendapat diatas bahwa Dana Perimbangan menjadi sumber dana bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dana Perimbangan untuk kegiatan pembangunan daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan Kinerja Keuangan Daerah meningkat.

4.3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018

Hasil penelitian dari hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian analisis regresi linier sederhana prediktor Belanja Modal dengan persamaan regresi $Y = -28,555 + 0,307X_3 + \varepsilon$. Nilai koefisien korelasi sebesar (r_{x_3y}) sebesar 0,59 dan koefisien determinasi ($r^2_{x_3y}$) sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 0,3% Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Belanja Modal (X_3), sementara 99,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Nilai signifikansi variabel Belanja Modal lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,682 ($0,682 > 0,05$), dan nilai t hitung sebesar 1,365 lebih kecil dari t tabel sebesar 0,496 ($0,496 < 1,97824$). sehingga pengaruh variabel Belanja Modal (X_3) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah positif namun tidak signifikan.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Antari (2018) dan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Rochmah (2015) yang berpendapat bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, akan tetapi selaras namun tidak sepenuhnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Andirfa dkk (2016) yang menyatakan bahwa Belanja Modal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Belanja modal yang dilakukan Pemerintah Daerah dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan investasi Pemerintah Daerah. Kegiatan belanja modal dapat menambah aktiva tetap yang dimiliki daerah dan diharapkan nantinya mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan dalam jangka panjang. Tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat semakin tinggi dan terjadi peningkatan kesejahteraan. Sementara itu apabila semakin banyak pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah maka nantinya dapat pula meningkatkan pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pernyataan tersebut maka mengindikasikan bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan pemerintah pada saat ini akan menghasilkan sumber-sumber keuangan beberapa tahun sehingga sumber-sumber keuangan yang dihasilkan melalui kegiatan belanja modal tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah beberapa tahun kemudian.

Faktor yang menyebabkan belanja modal belum berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah salah satunya disebabkan karena tidak semua kegiatan belanja modal mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi daerahnya sehingga pengaruhnya terhadap pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah belum kuat. Selain itu banyak pemerintah daerah yang belum menaruh perhatian besar kepada Belanja Modal. Persentase Belanja Modal terhadap total belanja daerah belum menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah, nilai Belanja Modal masih lebih kecil dibandingkan dengan Belanja Pegawai. Hal ini yang menyebabkan Belanja Modal belum mampu mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah daerah harusnya menaruh porsi besar Belanja Modal dalam anggaran.

Menurut wawancara penguatan data, pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan itu relatif dan dapat dilihat dari jenis belanja modal itu sendiri. Langkah konkret yang bisa diambil oleh Pemerintah Daerah adalah dengan meningkatkan belanja modal yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat serta bersifat dapat menambah

Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mempengaruhi langsung terhadap kinerja keuangan. Contohnya Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Faktor yang menyebabkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan adalah Belanja Modal untuk ajang prestise. Contohnya pembangunan gedung yang tidak berhubungan langsung dengan produktifitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Namun terdapat juga belanja modal yang ditujukan untuk ajang prestise tetapi belanja modal tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Contohnya belanja modal seperti pembangunan stadion dan museum yang dengan adanya bangunan tersebut dapat mendatangkan income yang lebih besar terhadap pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan dengan adanya pemanfaatan atas bangunan tersebut bangunan tersebut akan muncul Pajak Hiburan, Pajak Parkir serta Retribusi daerah yang tentunya akan berdampak terhadap kinerja keuangan daerah. Selain itu Polemik Belanja Modal Kendaraan Dinas untuk pimpinan yang jika dibandingkan dengan sewa kendaraan lebih baik sewa kendaan dapat menjadi faktor penyebab tidak berpengaruhnya Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

4.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018

Hasil penelitian mendukung hipotesis keempat bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian analisis regresi linier berganda dengan persamaan regresi $Y = -91,81 + 3,696X_1 - 0,195X_2 + 0,113X_3 + \varepsilon$. Persamaan tersebut menjelaskan bahwa nilai konstanta sebesar -91,81 menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal dianggap konstan maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar -91,81 persen. Nilai koefisien X_1 sebesar 3,696 berarti apabila Pendapatan Asli Daerah (X_1) meningkat satu persen maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan meningkat sebesar 3,696 persen dengan asumsi X_2 , dan X_3 tetap. Nilai koefisien X_2 sebesar -0,195 berarti apabila Dana Perimbangan (X_2) meningkat satu persen maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan menurun sebesar 0,195 persen dengan asumsi X_1 , dan X_3 tetap. Nilai koefisien X_3 sebesar 0,113 berarti apabila Belanja Modal (X_3) meningkat satu persen maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,113 persen dengan asumsi X_1 , dan X_2 dianggap tetap.

Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan *level of significant* yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$), dan Nilai F hitung lebih besar dari F tabel dengan nilai sebesar 1288,609 $> 2,67$. Nilai koefisien korelasi ($R_{Y(1,2,3)}$) sebesar 0,983, koefisien korelasi tersebut bernilai positif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Perimbangan (X_2), dan Belanja Modal (X_3) maka secara simultan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan meningkat. Nilai koefisien determinasi ($R^2_{Y(1,2,3)}$) menunjukkan hasil sebesar 0,966. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal sebesar 96,6%, sedangkan sisanya yaitu 3,4 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan Belanja Modal (X_3) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Penelitian ini menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya, dimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Meskipun secara parsial Belanja Modal tidak

berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun apabila dilihat pengaruhnya secara bersama-sama dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terlihat bahwa pengaruh yang dihasilkan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sangat kuat.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018.
2. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018.
3. Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018)

Daftar Pustaka

- Andirfa, M., Majid, M. S., & Basri, H. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5 (3), 30-38.
- Andrews, & Lorraine. (2012). Classic Grounded Theory to Analyze Secondary Data: Reality and Reflections. *The Grounded Theory Review Volume 11, Issue 1*, 12-26.
- Antari, N. P., & Panji S, I. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7 (2), 1080-1110.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2014-2018*. Bandung: Badan Pusat Statistik.
- Budianto, & Alexander, S. (2016). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4 (4), 844-851.
- Ditjen Bina Keuangan Daerah. (2013). Diambil kembali dari Belanja Modal Pemda Harus Capai 30 Persen: <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen>
- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Halaskova, M., & Halaskova, R. (2016). Assessment of Financial Capabilities of Local Governments in EU Countries for the Development of Local Public Services. *Journal of Local Self-Government*, 14 (3), 379-397.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Kementerian Dalam Negeri. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian Keuangan. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 Tentang Bagian Akun Standar*.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YPKN.
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Maimunah, M. (2006). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Symposium Nasional Akuntansi IX*, 23-26.
- Nur, T. (2011). Diambil kembali dari Tiga Belas masalah pengelolaan keuangan negara dan daerah: <http://www.rajawaligarudapancasila.blogspot.com>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Rochmah, S. N. (2015). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rosemary, Justine, C., & Barry, B. (2016). Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil. *Journal of Business and Management Review OMAN Chapter, 5 (10)*, 38-54.
- Wildan, M. (2019). Diambil kembali dari Sri Mulyani: Hanya 30 Persen dari APBD yang berdampak kepada rakyat : <http://www.m.bisnis.com>